SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 170/ 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 170/ 12 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

Membaca : Surat Bupati Karanganyar Nomor : 180/1349.1.3 tanggal 4 Maret 2019 Hal : Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2019;

Menimbang : a. bahwa dengan usulan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 oleh Bupati, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 170/12 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 perlu diubah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 170/12 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 73);
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 170/12 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 18 Maret 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 170/ 12 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2019.

Pasal I

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 170/12 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 pada lampiran setelah nomor urut 12 ditambah lima nomor yaitu nomor 13, nomor 14, nomor 15 nomor 16 dan nomor 17, sehingga secara keseluruhan tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR

SUJARNO
NIP. 19630107 199003 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 170/ 5 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 170/ 12 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2019

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2019

NO (1)	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAK-SANAAN (5)	DISERTAI (6)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (7)	TARGET PENYAM-PAIAN (8)	KETERANGAN (9)
			BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1.	PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL	- Perlindungan pedagang pasar - Pemberdaya-an pedagang pasar	Baru		2019	Naskah Akademik		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Oktober 2019	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
2.	LEMBAGA KOPERASI SIMPAN PINJAM	- Penerbitan ijin usaha - Penerbitan pembukaan kantor	Baru		2019	Naskah Akademik		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Oktober 2019	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1	2	3	4		5	6		7	8	9
		cabang, cabang pembantu, dan kantor kas - Pemeriksaan dan pengawasan - Penilaian kesehatan koperasi								
3.	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2018-2023	Visi-Misi dan Program Bupati 2018-2023	Baru		2019		Penjelasan	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	Februari 2019	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
4.	KAWASAN TANPA ASAP ROKOK	- Kriteria Kawasan Tanpa Asap Rokok - Larangan - Sanksi - Zonasi	Baru		2019	Naskah Akademik		Dinas Kesehatan	Agustus 2019	

1	2	3	4		5	6		7	8	9
5.	PERUBAHAN KEDUA PERDA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA	Perubahan sesuai Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Antara lain : a. Hak Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Perangkat Desa; b. Kedudukan keuangan Perangkat Desa		Ubah	2019		Penjelasan	1. Pemerintahan Desa 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Februari 2019	
6.	PERUBAHAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNI-KASI	- Zonasi Perijinan Pengendalian - Asuransi dan dana sosial agar dispesifikasi-kan - Menghapus ketentuan izin gangguan		Ubah	2019		Penjelasan	1. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Agustus 2019	Kemendagri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Izin Gangguan

1	2	3	4		5	6		7	8	9
7.	IZIN REKLAME DAN PENGELOLAAN REKLAME	- Nilai Jual Reklame - Izin Reklame - Mencabut Perda Nomor 14 Tahun 2006	Baru		2019	Naskah Akademik		1. Badan Keuangan Daerah 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Agustus 2019	- Mencabut Perda Nomor 14 Tahun 2006 - Tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
8.	PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKAT-AN DESA	Perubahan Peraturan Daerah menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyaraka-tan Desa dan		Ubah	2019		Penjelasan	1. Pemerintahan Desa 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Agustus 2019	

1	2	3	4		5	6		7	8	9
		Lembaga Adat Desa, cukup diatur dengan Peraturan Bupati								
9.	PERUBAHAN PERDA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	- Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Hasil Evaluasi kelembagaan		Ubah	2019		Penjelasan	1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 2. Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 3. Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan 4. Dinas Peternakan	Agustus 2019	Ada analisa Kajian susunan Perangkat Daerah
10.	TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Mencabut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru		2019		Penjelasan	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan	Agustus 2019	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah - Pasal 376 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1	2	3	4		5	6		7	8	9
11.	RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN (RDTRK)	Tindak Lanjut Perda Tata Ruang	Baru		2019	Naskah Akademik		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Agustus 2019	Perpres Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
12.	PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH	Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Baru		2019		Penjelasan	Semua Perangkat Daerah Mengeluarkan Perizinan		Tindak Lanjut Pelaksanaan OSS
13.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA	Pengaturan mengenai Direksi, Dewan Pengawas Modal Dasar dan Struktur Organisasi		Ubah	2019		Penjelasan	1. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah 2. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah-an Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

1	2	3	4		5		6	7	8	9
14.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR (PERSERODA)	Perubahan kepemilikan saham, sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Daerah		Ubah	2019		Penjelasan	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah		- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah-an Daerah
15.	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR	Perubahan struktur tarif retribusi biaya kendaraan terkait perubahan		Ubah	2019		Penjelasan	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman		- SE Nomor 1/AJ.502/DRJD/2019 Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan

1	2	3	4		5		6	7	8	9
	NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM	sistem uji kendaraan								Dirjen Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402 /DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala
16.	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PT. BPD. BANK JATENG	Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah		Ubah	2019		Penjelasan	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah		
17.	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH	Kekayaan daerah yang dipisahkan dalam bentuk tanah dan bangunan	Baru		2019	NA		1. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah 2. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ANEKA USAHA DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KARANGANYAR (PERSERODA)									

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR KUMULATIF TERBUKA

NO. (1)	TENTANG (2)	MATERI POKOK (3)	STATUS (4)		PELAK-SANAAN (5)	DISERTAI (6)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (7)	TARGET PENYAM-PAIAN (8)	KETERANGAN (9)
			BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran	Baru		2019		Penjelasan	Badan Keuangan Daerah	Oktober 2019	- Rutin; - Pasal 239 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2020; b. Pertanggung-jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; c. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	Baru	Ubah	2019 2019		Penjelasan Penjelasan		Maret 2019 Juni 2019	Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2.	Akibat Putusan Mahkamah Agung	Rancangan yang harus disesuaikan guna menindak-lanjuti putusan Mahkamah Agung								Pasal 239 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

KETUA DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,

SUGARNO
NIP. 19630107 199003 1 004